

ABSTRAK

Sebagai salah satu upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia adalah penerapan agenda pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Atas dasar hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada hakekatnya, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penulisan tesis ini dibatasi pada ruang lingkup Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan unit layanan pengadaan, dengan mengetahui faktor apa saja yang dihadapi (menjadi permasalahan) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah (solusi) yang ada tersebut.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa belum terlaksana secara optimal, karena belum terbentuknya unit layanan pengadaan yang independen pada organisasi pemerintah.

Implementasi kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Implementasi kebijakan pembentukan unit layanan pengadaan ini membutuhkan prasyarat dasar, yaitu: (i) adanya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, (ii) tersedianya standar operasional prosedur yang baku dan terintegrasi untuk pelaksanaan layanan pengadaan yang baik, dan (iii) struktur organisasi.

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan data: (1) historis berupa dokumentasi dan narasi, (2) data studi kepustakaan dan studi dokumenter, dan (3) data lapangan berasal dari responden.

Berdasarkan hasil analisis data, penulis menyimpulkan bahwa prasyarat dasar keberhasilan proses implementasi kebijakan dalam pembentukan unit layanan pengadaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sangat dipengaruhi terutama oleh faktor struktur organisasi, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penulis menyarankan agar dilakukan perbaikan/revisi terhadap proses kebijakan dalam pembentukan unit layanan pengadaan yang independen.

Kata Kunci : Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Good Governance

ABSTRACT

The embodiment of good government governance in Indonesia includes the eradication agenda of corruption, collusion and nepotism. In order to follow this up, the Government has published Presidential Regulation article 4 of 2015 as the fourth amendment of Presidential Regulation Article 54 of 2010 about Government Procurement of Goods and/or Services. Hence, the implementation of good government procurement system is one that enable the actualization of the principles of good government governance.

This research is limited to analyze the policy implementation on the establishment of the Procurement Services Unit at the General Directorate of the Nation Wealth, Indonesian Ministry of Finance. The research purposes are describing the process of policy implementation of the procurement services unit, knowing factors that becomes the problems as well as the solutions being made to overcome that problems.

The result of this research shows that application of the principles of good government governance in the procurement of goods and/or services has not been done optimally, as an independent procurement services unit in government organizations has not been established yet.

The policy implementation of the Procurement Services Unit on the General Directorate of the Nation Wealth, Indonesian Ministry of Finance is based on the Presidential Regulation article 4 of 2015 as the fourth amendment of Presidential Regulation Article 54 of 2010 about Government Procurement of Goods and/or Services. The policy implementation of the procurement services unit requires these following basic preconditions: (i) the human resources both in quantity and quality, (ii) the availability of good standard operational procedure that is integrated to the implementation of the procurement service, and (iii) organizational structure.

This research uses a descriptive analysis, by the use of data: (1) the historical documentation and narratives, (2) the literature and document study, and (3) the data that are derived from respondents.

Based on the data analysis, this research concludes that the basic precondition for the success of the policy implementation process in the establishment of the procurement services unit at the Directorate General of State Asset Management, Ministry of finance, strongly influenced by the structure of the Organization, as mandated by the regulations.

This research suggests that the policy implementation process in the formation of an independent procurement services unit needs to be revised to be accorded to the regulations.

Keywords: Procurement Services Unit Of The Goods/Services Of Government, Good Governance